PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

RENJA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2027





PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 54 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang terarah, profesional, dan berkesinambungan, perlu didukung dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selaras dengan tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan daerah;
b. bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat arah kebijakan, program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, target capaian, serta kebutuhan pendanaan yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Bupati adalah Bupati Bantul.
7. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

(1) Renja PD disusun berpedoman pada RKPD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
(2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah Tahun 2027.

Pasal 3

(1) Renja PD sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika:
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V : PENUTUP
(2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 5 Agustus 2026
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 5 Agustus 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026 NOMOR 54

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 54 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2027

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2027

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN BANTUL

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 15 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun.

Renja Perangkat Daerah disusun oleh setiap Perangkat Daerah termasuk oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Renja Perangkat Daerah tersebut memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan mengacu pada RKPD Tahun 2027. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 menjadi pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD Tahun 2027 dan digunakan sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Tahun 2027. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1
Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

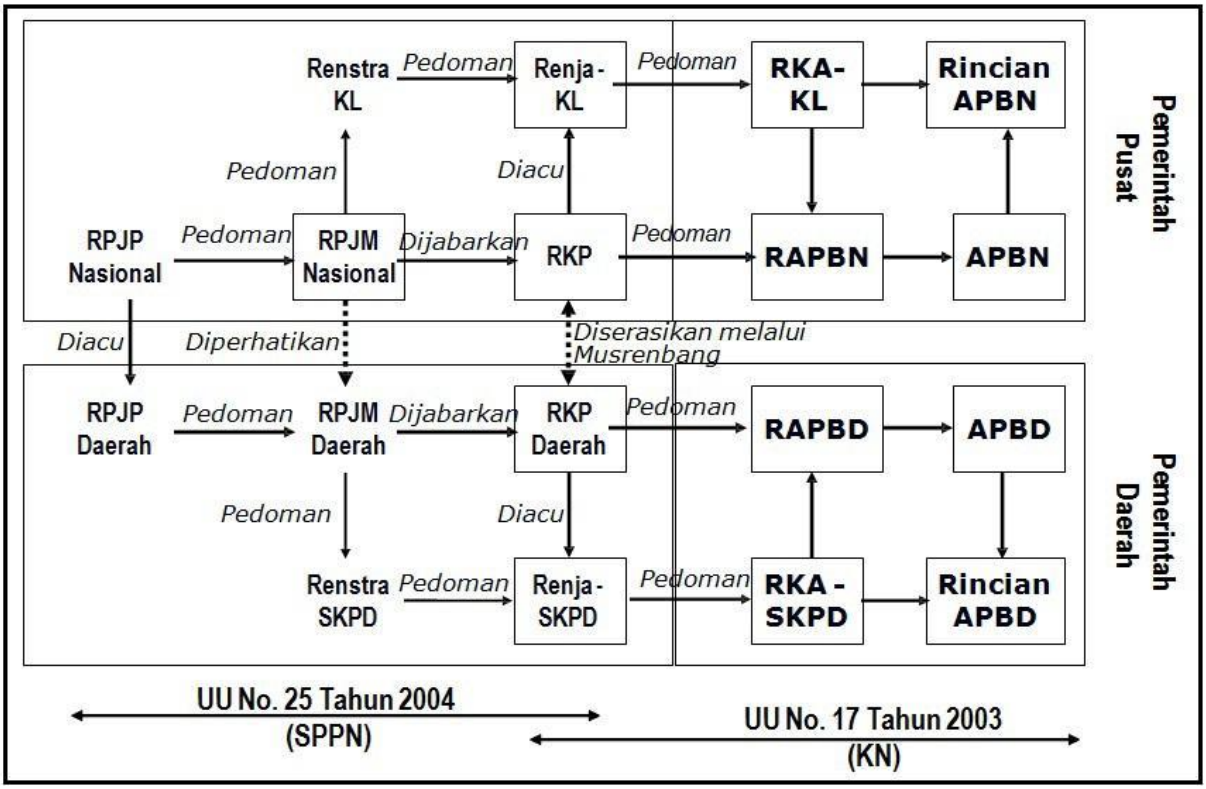

Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2027 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 163 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa

Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1108);

g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-861 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang tentang Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52);
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 6);

m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 50);
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 51);
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 49).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 disusun untuk menyesuaikan gambaran kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2027 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1) Sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Tahun 2027.
2) Sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Perangkat Daerah Tahun 2027.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2027
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Derah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II.
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan capaian Renstra Perangkat Daerah mencakup:

1. evaluasi capaian kinerja Tahun 2025 dikaitkan dengan pencapaian target Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026,
2. evaluasi capaian kinerja Tahun 2025 dan prakiraan capaian kinerja Tahun 2026 dikaitkan dengan pencapaian target kondisi akhir Renstra Tahun 2025-2029.

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah digunakan untuk:

1. mengetahui realisasi pencapaian target kinerja Tahun 2025 dan kendala yang dihadapi selama Tahun 2025,
2. memastikan bahwa indikator kinerja program, kegiatan, subkegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026,

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan capaian Renstra Perangkat Daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2022 sd. 2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)			
1	2	3	3a	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)	15
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai AKIP	Angka	92	89	90	81.70	90.61%	82	82	Sekretariat
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat
2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Dokumen	8	8	-	-	-	8	100	Sub Bagian Program dan Keuangan
		Dokumen perencanaan dan pelaporan	Dokumen	4	4	-	-	-	4	100	Sub Bagian Program dan Keuangan
		Laporan Koordinasi, Peningkatan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Dokumen	1	1	-	-	-	1	100	Sub Bagian Program dan Keuangan

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2022 sd. 2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)			
1	2	3	3a	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)	15
2 16 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	4	4	100%	100%	25	Sub Bagian Program dan Keuangan
2 16 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	Dokumen	7	24	4	4	100%	100%	14	Sub Bagian Program dan Keuangan
2.16. 01.2. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	%	100	100	100	100	100%	100%	1	Sekretariat
2.16. 01.2. 02.0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji ASN yang di bayarkan	Kali	14	14	-	-	-	14	100	Sub Bagian Program dan Keuangan
		Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai yang dibayarkan	Bulan	12	12	-	-	-	12	100	Sub Bagian Program dan Keuangan
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	49	94	47	47	100%	141	288	Sub Bagian Program dan Keuangan
2 16 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	24	12	12	100%	36	300	Sub Bagian Program dan Keuangan

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2022 sd. 2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)			
1	2	3	3a	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)	15
2 16 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dokumen	18	36	12	12	100%	48	267	Sub Bagian Program dan Keuangan
2 16 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Barang Milih Daerah pada Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100%	200	200	Sekretariat
2 16 01 2.03 04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan,dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	24	12	12	100%	36	300	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2 16 01 2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	%	100	100	-	-	-	100	100	Sekretariat
2 16 01 2.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	dokumen	12	12				12	100	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2022 sd. 2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)			
1	2	3	3a	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)	15
2.16.01.2.06	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100%	200	200	Sekretariat
2.16.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dokumen	1	1	-	-	-	1	100	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	-	-	-	-	-	-	-	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2 16 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	12	24	12	12	100%	36	300	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	%	100	100	100	100	100%	200	200	Sekretariat
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan alat listrik	Jenis	13	39	-	-	-	52	325	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2022 sd. 2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)			
1	2	3	3a	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)	15
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	13	26	13	13	100%	39	300	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis	10	10	-	-	-	10	100	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Penyediaan Notebook	Unit	3	3	-	-	-	3	100	
		Penyediaan Peralatan Studio Audio	Jenis	10	10	-	-	-	10	100	
		Gordyn	Meter	22	22	-	-	-	22	100	
		Kursi Operator	Unit	2	2	-	-	-	2	100	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis	2	2	-	-	-	2	100	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Alat Pendingin	Unit	1	1	-	-	-	1	100	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Alat Pencacah kertas	Unit	1	1	-	-	-	1	100	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2022 sd. 2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)			
1	2	3	3a	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)	15
		Peralatan Studio Video	Jenis	1	1	-	-	-	1	100	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	8	13	9	9	100%	22	275	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2.16.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis	7	10	9	9	100%	19	271	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	7	14	-	-	-	14	200	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2 16 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	33	66	-	-	-	66	200	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis	2	2	-	-	-	2	100	Bagian Umum dan Kepegawaian
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	4	2	2	100%	6	300	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Penyediaan Bahan Bacaan	Jenis	3	3				3	100	Bagian Umum dan Kepegawaian

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2022 sd. 2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)			
1	2	3	3a	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)	15
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jenis	3	6	3	3	100%	9	300	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2 16 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	24	12	12	100%	36	300	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2.16. 01.2. 06.0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Dokumen	3	3	-	-	-	3	100	Bagian Umum dan Kepegawaian
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	24	12	12	100%	36	300	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2 16 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	24	12	12	100%	36	300	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2 16 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	12	24	12	12	100%	36	300	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2022 sd. 2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)			
1	2	3	3a	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)	15
2 16 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	-	-	-	100	100	Bagian Umum dan Kepegawaian
2 16 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	1	1	-	-	-	1	100	Bagian Umum dan Kepegawaian
2.16. 01.2. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100	100	100%	100	100	Sekretariat
2.16. 01.2. 08.0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan Pengelolaan Jasa Surat Menyurat	Dokumen	1	1	-	-	-	1	100	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	24	12	12	100%	36	300	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2 16 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	24	12	12	100%	36	300	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2.16. 01.2. 08.0 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Dokumen	1	1	-	-	-	1	100	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2022 sd. 2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)			
1	2	3	3a	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)	15
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	24	12	12	100%	36	300	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dokumen	1	1	-	-	-	1	100	Sekretariat
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dokumen	12	24	12	12	100%	36	300	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%	100	100	100	100	100%	200	200	Sekretariat
2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Laporan pemeliharaan Kendaraan dinas	Dokumen	1	1	-	-	-	1	100	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	17	34	17	17	100%	51	300	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2022 sd. 2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)			
1	2	3	3a	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)	15
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Laporan pemeliharaan Peralatan dan Mesin kantor	Dokumen	1	1	-	-	-	1	100	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	186	320	186	186	100%	506	272	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Laporan pemeliharaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung	1	1	-	-	-	1	100	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Unit	1	2	1	1	100.00%	3	300	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	%	74	72	73	73	100%	145	196	Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2022 sd. 2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)			
1	2	3	3a	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)	15
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	%	100	100	100	100	100%	200	200	Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Penanganan aduan masyarakat yang masuk melalui aplikasi Lapor Bantul dan Lapor SP4N	Penanganan aduan	92	92	-	-	-	92	100	Ketua Tim
		Peliputan kegiatan pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Bantul	Liputan	307	307	-	-	-	307	100	Ketua Tim
		Laporan indek kualitas pelayanan informasi public	Dokumen	1	1	-	-	-	1	100	Ketua Tim
		Laporan analisis isu publik bulanan	Dokumen	12	12	-	-	-	12	100	Ketua Tim
		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Dokumen	12	24	-	-	-	24	200	Ketua Tim
2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Rekomendasi	-	-	12	12	100%	12	100	Ketua Tim

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2022 sd. 2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)			
1	2	3	3a	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)	15
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	Konten informasi	260	6582	-	-		6582	2,532	Ketua Tim
		Jumlah Pembangunan Papan Reklame/Baliho	Unit	3	3	-	-	-	3	100	Ketua Tim
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	12	24	-	-	-	24	200	Ketua Tim
2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Media	-	-	12	12	100%	12	-	Ketua Tim
2 16 02 2.01 06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen	12	24	-	-	-	24	200	Ketua Tim
2.16.02.2.01.017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Permohonan	-	-	20	32	160%	32	-	Ketua Tim

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2022 sd. 2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)			
1	2	3	3a	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)	15
2.16 02 201 12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Tingkat Desa yang dikembangkan dan diberdayakan	Kelompok Informasi Masyarakat (KIM	90	52	-	-	-	52	58	Ketua Tim
		Badan public yg memiliki PPID	Badan public	211	132	-	-	-	132	63	Ketua Tim
		Komunitas masyarakat/ mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	Komunitas masyaraka	75	34	-	-	-	34	45	Ketua Tim
		Publikasi kegiatan pemerintah oleh media massa	Publikasi kegiatan	40	55	-	-	-	55	138	Ketua Tim
		Laporan Kegiatan Pusat Informasi dan Konseling	Dokumen	11	11	-	-	-	11	100	Ketua Tim
		Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Dokumen	12	24	-	-	-	24	200	Ketua Tim

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2022 sd. 2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)			
1	2	3	3a	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)	15
2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Komunitas	-	-	53	53	100%	53		
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Tingkat Kematangan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE	Angka	3	3.30	3.30	3.3	100%	7	220	Bidang Tata Kelola e-Government, Aplikasi Informatika dan Statistik
		Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	100	100	100%	200	200	Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian
	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang diawasi	%	100	100	100	100	100%	200	200	Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2022 sd. 2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)			
1	2	3	3a	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)	15
		Layanan domain/sub domain yang dimanfaatkan	domain/sub domain	416	757	-	-	-	757	182	Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian
2.16.03.2.02.04	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Perangkat Daerah (PD)	45	45	-	-	-	45	100	Ketua Tim
		Titik layanan yang terkonekeksi dengan jaringan intra pemerintah	Titik	45	45	-	-	-	45	100	Ketua Tim
		Sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	Sistem elektronik	100	80	-	-	-	80	80	Ketua Tim

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2022 sd. 2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)			
1	2	3	3a	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)	15
		Perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	Perangkat Daerah (PD	45	45	-	-	-	45	100	Ketua Tim
		Perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	Perangkat Daerah (PD	45	45	-	-	-	45	100	Ketua Tim
		Jaringan Internet dan Intranet untuk Sekolah Dasar (SD)	Jaringan	1	1	-	-	-	1	100	Ketua Tim
		Pembangunan Infrastruktur Internet	Lokasi	7	7	-	-	-	7	100	Ketua Tim
		Pengadaan Server HCI	Paket	1	1	-	-	-	1	100	Ketua Tim
		Sewa layanan Google Workspace	Akun	280	280	-	-	-	280	100	Ketua Tim
		Titik layanan yang terkonekeksi dengan jaringan	Titik layanan	233	233	-	-	-	233	100	Ketua Tim
		Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit	1	2	-	-	-	2	200	Ketua Tim
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	95	89	95	95	100%	184	194	Bidang Tata Kelola e-Government, Aplikasi Informatika dan Statistik

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2022 sd. 2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)			
1	2	3	3a	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)	15
2.16.03.2.02.0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Laporan	-	-	1	1	100%	1	-	Ketua Tim
2 16 03 2.02 03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Unit	1	2	-	-	-	2	200	Ketua Tim
2.16.03.2.02.0016	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	Dokumen			2	2	100%	2		
2 16 03 2.02 07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	Layanan	13	7	-	-	-	7	54	Ketua Tim
		Perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	Perangkat Daerah (PD	45	45	-	-	-	45	100	Ketua Tim
		Lembaga yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	Lembaga	5	5	-	-	-	5	100	Ketua Tim

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2022 sd. 2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)			
1	2	3	3a	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)	15
		Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Unit	9	14	5	5	100	18	200	Ketua Tim
2.16.03.2.02.0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Aplikasi	-	-	5	5	100.00%	5	-	Ketua Tim
2 16 03 2.02 08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Layanan	9	2	-	-	-	2	23	Ketua Tim
		Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Aplikasi	-	-	3	3	100%	3	-	Ketua Tim
2 16 03 2.02 09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Dokumen	1	2	-	-	-	2	200	Ketua Tim

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2022 sd. 2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)			
1	2	3	3a	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)	15
2 16 03 2.02 10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Menara telekomunikasi yang terkendali	Menara telekomunikasi	437	394	-	-	-	394	90	Ketua Tim
		Wifi publik yang di Fasilitasi	Titik	85	45	-	-	-	45	53	
		Peralatan Pemantauan Menara	Unit	1	1	-	-	-	1	100	
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen	1	2	-	-	-	2	200	Ketua Tim
	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	Layanan	14	14	-	-	-	14	100	Ketua Tim

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2022 sd. 2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)			
1	2	3	3a	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)	15
		Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	Layanan	10	7	-	-	-	7	70	Ketua Tim
		Perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Perangkat Daerah (PD	45	45	-	-	-	45	100	Ketua Tim
		Sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Sistem elektronik	71	77	-	-	-	77	108	Ketua Tim
		Perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung Smart City	Perangkat Daerah (PD	45	45	-	-	-	45	100	Ketua Tim
		Aparatur Sipil Negara pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	Aparatur Sipil Negara	58	28	-	-	-	28	48	Ketua Tim

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2022 sd. 2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)			
1	2	3	3a	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)	15
		Peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	Peraturan	14	11	-	-	-	11	79	Ketua Tim
2 16 03 2.02 12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	Dokumen	1	2	-	-	-	2	200	Ketua Tim
2.16. 03.2. 02.0 023	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	unit	-	-	45	45	100%	45	-	Ketua Tim
2.16. 03.2. 02.0 024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Perangkat Daerah	-	-	45	45	100%	45	-	Ketua Tim
2.16. 03.2. 02.0 027	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas	Program	-	-	53	53	100%	53	-	Ketua Tim

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2022 sd. 2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)			
1	2	3	3a	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)	15
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK									-	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100%	200	200	Bidang Tata Kelola e-Government, Aplikasi Informatika dan Statistik
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus data	%	100	97	98	100	102.04%	197	197	Bidang Tata Kelola e-Government, Aplikasi Informatika dan Statistik
		Persentase data yang dapat berbagi pakai	%	98	0	-	-	-	0	0	
		Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik	%	0	0	-	-	-	0	0	Ketua Tim
		persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik	%	0	0	-	-	-	0	0	Ketua Tim
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	System data dan statistik yang terintegrasi	System	1	4	-	-	-	4	400	Ketua Tim

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2022 sd. 2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)			
1	2	3	3a	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)	15
		Survey statistik sektoral yang dilakukan	Survey	63	40	-	-	-	40	63	Ketua Tim
		Kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	Kompilasi	80	52	-	-	-	52	65	Ketua Tim
		Statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	Statistik sektoral	25	7	-	-	-	7	28	Ketua Tim
		Kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	Kompilasi	25	5	-	-	-	5	20	Ketua Tim
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dokumen	2	4	-	-	-	4	200	Ketua Tim
2 20 02 2.01 03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Dokumen	225	415	-	-	-	415	184	Ketua Tim
2.20. 02.2. 01.0 010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	Dokumen	-		190	190	100%	190	-	Ketua Tim

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2022 sd. 2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)			
1	2	3	3a	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)	15
2.20.02.2.01.0011	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	Dokumen	-	-	50	50	100%	50	-	Ketua Tim
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN										
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	81	75.00	75	91.83	122.44%	167	206	Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal	%	25	100	100	100	100%	200	800	Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi (SMKI)	Sistem elektronik	159	129	-	-	-	129	81	Ketua Tim
		Sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	Sistem elektronik	10	10	-	-	-	10	100	Ketua Tim

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2022 sd. 2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)			
1	2	3	3a	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)	15
		Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat Daerah	45	90	45	45	100%	135	300	Ketua Tim
	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase titik yang diamankan berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	%	84	72	84	84	100%	156	186	Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian
	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Titik yang diamankan berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	Titik	12	12	-	-	-	12	100	Ketua Tim
		Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Perangkat Daerah	45	90	45	45	100%	135	300	Ketua Tim
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN										

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2022 sd. 2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)			
1	2	3	3a	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)	15
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan pemenuhan sarana prasarana budaya berbasis digital	%	100	71.43	85.71	85.71	100%	157	157	Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian
	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Capaian kinerja pembangunan sistem informasi	%	100	100	100	100	100%	200	200	Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian
	Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital	Jumlah Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital yang Dibangun	Objek	6	6	5	5	100%	11	183	Ketua Tim
		Dokumen perancangan Penanda QR Code Makam Raja Mataraman Kotagede	Dokumen	1	1	-	-	-	1	100	Ketua Tim
		ILM MRM Kotagede dan Kerto Pleret	ILM	1	1	-	-	-	1	100	Ketua Tim
		Pembangunan Aplikasi Sistem Informasi Makam Raja Kotagede	Aplikasi	1	1	-	-	-	1	100	Ketua Tim

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2022 sd. 2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)			
1	2	3	3a	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)	15
		Pembangunan sistem informasi melalui media Penanda QR Code di Makam Raja Mataram Kotagede	Penanda QR Code	1	1	-	-	-	1	100	Ketua Tim
		Pemeliharaan Jaringan internet dan CCTV di Makam Imogiri	Jaringan	1	1	-	-	-	1	100	Ketua Tim
		Pengadaan CCTV keamanan Makam Raja Mataram Kotagede	CCTV	1	1	-	-	-	1	100	Ketua Tim
		Iklan Layanan Masyarakat Publikasi Cagar Budaya Situs Kerto Pleret	Paket	1	1	-	-	-	1	100	Ketua Tim
		Internet untuk Padukuhan	Padukuhan	24	24	-	-	-	24	100	Ketua Tim
		Pemeliharaan Aplikasi Penanda di Makam Raja Mataram Imogiri dan Makam Raja Mataram Kotagede	Aplikasi	2	2	-	-	-	2	100	Ketua Tim
		Pemeliharaan CCTV monitoring keamanan di Makam Raja Mataram Imogiri dan Makam Raja Mataram Kotagede	Paket	2	2	-	-	-	2	100	Ketua Tim

Tabel 2.2
Prakiraan Capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
2.16 -	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
2.16.02 -	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK								
	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	99,00	98,50	98,60	98,60	100%	100%	100%
2.16.02.2.01 -	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
	Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul								
2.16.02.2.01. 0015 -	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat								
	Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	80	52	60	60	100%	100%	100%
2.16.02.2.01. 0017 -	Pelayanan Informasi Publik								

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
	Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	20	20	20	20	100%	100%	100%
2.16.02.2.01.0019 -	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik								
	Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	12	12	12	12	100%	100%	100%
2.16.02.2.01.0021 -	Pengelolaan Media Komunikasi Publik								
	Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	12	12	12	12	100%	100%	100%
2.16.03 -	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA								
	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Tingkat kematangan pembangunan/pengembangan aplikasi	1.8	n/a	1.6	1.6	100%	100%	100%
		Tingkat kematangan layanan jaringan intra pemerintah	1.8	n/a	1.6	1.6	100%	100%	100%
2.16.03.2.02 -	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
	Meningkatnya Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul								

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
2.16.03.2.02.0024 -	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota								
	Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	45	45	45	45	100%	100%	100%
2.16.03.2.02.0032 -	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE								
	Terlaksananya pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	31	18	23	23	100%	100%	100%
2.16.03.2.02.0033 -	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah								
	Terlaksananya penyelenggaraan pusat kendali pemerintah daerah	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali	2	2	2	2	100%	100%	100%
2.16.03.2.02.0034 -	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan								
	Terlaksananya Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem	24	10	16	16	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
		Penghubung Layanan Pemerintah Daerah							
2.16.03.2.02.0036 -	Penyediaan Akses Internet								
	Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	17	17	17	17	100%	100%	100%
2.16.03.2.02.0037 -	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah								
	Terlaksananya koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	1	1	1	1	100%	100%	100%
2.16.03.2.02.0038 -	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas								
	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	1	1	1	1	100%	100%	100%
2.16.01 -	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
	Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	94.7	94.25	94.3	94.3	100%	100%	100%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	82	81,58	81.6	81.6	100%	100%	100%
2.16.01.2.01 -	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
	Terwujudnya laporan capaian kinerja keuangan, data serta bahan evaluasi untuk akuntabilitas Perangkat Daerah								
2.16.01.2.01. 0001 -	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	4	4	4	100%	100%	100%
2.16.01.2.01. 0007 -	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16	16	16	16	100%	100%	100%
2.16.01.2.02 -	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
	Terwujudnya sistem administrasi Keuangan yang akuntabel, tertib dan lancar								
2.16.01.2.02. 0001 -	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54	54	54	54	100%	100%	100%
2.16.01.2.02. 0002 -	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	12	12	100%	100%	100%
2.16.01.2.02.0007 -	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	18	18	18	100%	100%	100%
2.16.01.2.03 -	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
	Terwujudnya sistem administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang akuntabel, tertib dan lancar	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD							
2.16.01.2.03.0004 -	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD								
	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12	12	12	12	100%	100%	100%
2.16.01.2.05 -	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
	Terwujudnya sistem administrasi kepegawaian yang akuntabel, tertib dan lancar								

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
2.16.01.2.05.0005 -	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai								
	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12	12	12	12	100%	100%	100%
2.16.01.2.06 -	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
	Terwujudnya sistem administrasi umum yang akuntabel, tertib dan lancar								
2.16.01.2.06.0001 -	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	13	13	13	13	100%	100%	100%
2.16.01.2.06.0002 -	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8	8	8	8	100%	100%	100%
2.16.01.2.06.0003 -	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7	7	7	7	100%	100%	100%
2.16.01.2.06.0005 -	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	2	2	100%	100%	100%
2.16.01.2.06.0006 -	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3	3	3	3	100%	100%	100%
2.16.01.2.06.0008 -	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	12	12	100%	100%	100%
2.16.01.2.06.0009 -	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	12	12	100%	100%	100%
2.16.01.2.06.0010 -	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD								
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	12	12	12	100%	100%	100%
2.16.01.2.06.0011 -	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD								
	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12	12	12	12	100%	100%	100%
2.16.01.2.08 -	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan							
2.16.01.2.08.0001 -	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	12	12	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
2.16.01.2.08.0002 -	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12	12	100%	100%	100%
2.16.01.2.08.0003 -	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	12	12	12	100%	100%	100%
2.16.01.2.08.0004 -	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	12	12	100%	100%	100%
2.16.01.2.09 -	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara							
2.16.01.2.09.0001 -	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17	17	17	17	100%	100%	100%
2.16.01.2.09.0006 -	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	186	186	186	186	100%	100%	100%
2.16.01.2.09.0009 -	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	1	1	100%	100%	100%
2.21 -	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN								
2.21.02 -	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI								
	Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi di Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat keamanan informasi pemerintah	96.9	96.45	96.5	96.5	100%	100%	100%
2.21.02.2.01 -	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
	Terselenggaranya Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian							
2.21.02.2.01.0007 -	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah								
	Tersedianya Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	45	45	45	45	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
2.21.02.2.02 -	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota								
	Terlaksananya Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten Bantul	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.							
2.21.02.2.02.0002 -	Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah								
	Terlaksananya Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.	45	45	45	45	100%	100%	100%
2.22 -	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								
2.22.08 -	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**								
	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di masyarakat	Indeks Teknologi Informasi dan Komunikasi	2.58	2.53	2.54	2.54	100%	100%	100%
2.22.08.5.04 -	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan								
	Terlaksananya pembangunan Sarana Prasarana Keistimewaan								

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
	Urusan Kebudayaan di Kabupaten Bantul								
2.22.08.5.04.0002 -	Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital								
	Terlaksananya Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital	Jumlah Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital yang Dibangun	6	5	6	6	100%	100%	100%
		Nilai Domain Prinsip Satu Data Indonesia	3,31	3,25	3,27	3,27	100%	100%	100%
2.20 -	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK								
2.20.02 -	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL								
	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100	100	100	100	100%	100%	100%
		Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100	100	100	100	100%	100%	100%
2.20.02.2.01 -	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota								
	Meningkatnya kualitas, aksesibilitas, dan pemanfaatan data statistik sektoral yang akurat dan terstandarisasi untuk mendukung perencanaan pembangunan, pengambilan keputusan, dan pelayanan publik yang berbasis data								

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
2.20.02.2.01.0018 -	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia								
	Tersedianya Statistik Sektoral yang memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	100	90	90	90	100%	100%	100%
2.20.02.2.01.0021 -	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar								
	Terlaksananya Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	100	100	100	100	100%	100%	100%

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 pada Tabel 2.1 dan prakiraan capaian Tahun 2026 pada Tabel 2.2. dapat dijelaskan faktor penghambat dan pendukung keberhasilan pencapaian kinerja sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja meliputi:
   a. Urusan Komunikasi dan Informatika

      Urusan ini merupakan wajah instansi dalam diseminasi informasi dan infrastruktur digital.

      1) Kesenjangan Infrastruktur *(Digital Divide):* Adanya wilayah yang masih mengalami kendala sinyal (*blank spot*), terutama di daerah pelosok/topografi sulit, yang menghambat pemerataan akses informasi.
      2) Kecepatan Perubahan Teknologi: Dinamika teknologi informasi yang sangat cepat sering kali tidak sebanding dengan siklus pengadaan barang/jasa pemerintah yang kaku, sehingga perangkat cepat mengalami keusangan (*obsolescence*).
      3) Rendahnya Literasi Digital Masyarakat: Tingginya penyebaran berita bohong (*hoax*) dan disinformasi yang sulit dibendung karena kapasitas pemahaman digital masyarakat belum merata.
      4) Keterbatasan *Bandwidth:* Lonjakan kebutuhan akses data untuk aplikasi perkantoran dan pelayanan publik yang tidak dibarengi dengan penambahan kapasitas pita lebar secara memadai.

   b. Urusan Statistik

      Urusan ini memiliki tantangan utama dalam hal validitas dan integrasi data.

      1) Ego Sektoral antar Perangkat Daerah: Sulitnya melakukan kompilasi data karena setiap instansi (Produsen Data) masih cenderung menutup diri atau memiliki format data yang tidak seragam.
      2) Kurangnya Tenaga Fungsional Statistisi: Keterbatasan jumlah SDM yang memiliki keahlian khusus dalam pengolahan dan analisis data statistik sektoral yang mendalam.

3) Data Belum Terintegrasi (Silos Data): Belum optimalnya implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di tingkat daerah, sehingga sering terjadi perbedaan data antara satu instansi dengan instansi lainnya untuk indikator yang sama.
4) Kualitas Data Sumber: Data yang dikirimkan oleh penyedia data seringkali tidak tepat waktu atau kurang akurat karena sistem pencatatan di tingkat paling bawah (desa/kecamatan) belum terstandar.

c. Urusan Persandian

Urusan ini berkaitan erat dengan keamanan informasi dan proteksi data.

1) Ancaman Siber yang Meningkat: Maraknya serangan *malware*, *ransomware*, hingga peretasan situs pemerintah yang memerlukan sistem pertahanan berlapis dan pemantauan setiap saat.
2) Kurangnya Kesadaran Keamanan Informasi (*Cyber Awareness):* Rendahnya kepedulian aparatur terhadap keamanan siber, seperti penggunaan kata sandi yang lemah atau pengunduhan aplikasi ilegal yang menjadi pintu masuk serangan.
3) Keterbatasan Perangkat Kriptografi: Belum memadai alat pendukung keamanan informasi yang tersertifikasi secara nasional untuk melindungi dokumen rahasia negara/daerah.
4) Minimnya SDM Manggala Informatika: Kelangkaan tenaga ahli di bidang *Cyber Security* yang memiliki sertifikasi kompetensi khusus untuk menangani insiden siber secara cepat.

2. Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja meliputi:

a. Urusan Komunikasi dan Informatika

Urusan ini didukung oleh akselerasi digitalisasi yang menjadi prioritas nasional.

1) Dukungan Regulasi Percepatan Digital: Adanya Instruksi Presiden dan regulasi daerah tentang Transformasi Digital memberikan payung hukum yang kuat untuk pengembangan infrastruktur TIK.

2) Ketersediaan Infrastruktur Jaringan: Perluasan jaringan serat optik (*Fiber Optic*) dan penyediaan WiFi publik yang semakin merata di titik-titik strategis memudahkan diseminasi informasi.
3) Kemitraan Media yang Luas: Hubungan yang harmonis dengan rekanan media (cetak, elektronik, dan online) serta optimalisasi media sosial resmi dinas mempercepat penyampaian informasi program pemerintah kepada masyarakat.
4) Sinergi Komunitas Kelompok Informasi Masyarakat (KIM): Eksistensi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagai mitra dinas di tingkat desa membantu menjangkau masyarakat hingga ke akar rumput.

b. Urusan Statistik

Urusan ini didukung oleh semangat pengintegrasian data menuju kebijakan yang berbasis data (*data-driven policy*).

1) Implementasi Kebijakan Satu Data: Adanya komitmen kuat dari pimpinan daerah melalui Forum Satu Data memudahkan proses koordinasi pengumpulan data antar-Perangkat Daerah.
2) Sistem Portal Data Terintegrasi: Tersedianya portal data terbuka (*Open Data*) yang sudah mapan memudahkan produsen data untuk mengunggah dan membagikan data sektoral secara mandiri.
3) Pendampingan Badan Pusat Statistik (BPS): Koordinasi dan supervisi rutin dari BPS selaku pembina data statistik nasional memastikan metodologi dan kualitas data daerah sesuai dengan standar nasional.
4) Peningkatan Kesadaran Data: Meningkatnya pemahaman perangkat daerah akan pentingnya data akurat sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan anggaran.

c. Urusan Persandian

Urusan ini didukung oleh meningkatnya kesadaran akan kedaulatan data dan keamanan informasi.

1) Sertifikasi Elektronik (TTE): Adanya kerja sama yang kuat dengan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) memudahkan implementasi Tanda Tangan Elektronik yang aman di seluruh jajaran birokrasi.
2) Terbentuknya Tim Tanggap Insiden Siber : Eksistensi tim khusus yang sudah teregistrasi, memberikan jaminan respon cepat terhadap ancaman peretasan atau gangguan keamanan siber.
3) Audit Keamanan Informasi Berkala: Dilakukannya *Vulnerability Assessment* (uji kerentanan) secara rutin terhadap aplikasi-aplikasi strategis pemerintah guna menutup celah keamanan sejak dini.
4) Infrastruktur Data Center yang Standar: Kepemilikan gedung pusat data yang telah memenuhi standar keamanan fisik dan akses terbatas untuk melindungi aset informasi rahasia daerah.

Sebagaimana faktor-faktor penghambat dan pendukung tersebut maka langkah strategis pada Tahun 2027 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Transformasi Infrastruktur dan Perluasan Akses (Urusan Komunikasi dan Informatika)
   a. Penuntasan *Blank Spot*: Melakukan akselerasi pembangunan infrastruktur jaringan di wilayah terpencil melalui kolaborasi dengan penyedia layanan internet (ISP) dan optimalisasi dana bantuan pusat.
   b. Modernisasi *Data Center*: Melakukan pemutakhiran perangkat keras (*hardware*) dan peningkatan kapasitas *bandwidth* untuk mengantisipasi beban kerja aplikasi pelayanan publik yang semakin meningkat.
   c. Penguatan Literasi Digital: Mengintensifkan program edukasi masyarakat melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) untuk menangkal hoaks dan meningkatkan kecakapan digital masyarakat.
2. Akselerasi Ekosistem Data Terintegrasi (Urusan Statistik)
   a. Optimalisasi Forum Satu Data: Memperkuat peran Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Walidata dengan memberikan pendampingan

teknis kepada setiap Perangkat Daerah agar data sektoral yang dihasilkan akurat dan tepat waktu.

b. Pengembangan Analisis *Big Data*: Mulai mengimplementasikan alat analisis data yang lebih canggih untuk mengolah data sektoral menjadi informasi kebijakan prediktif bagi pimpinan daerah (*Executive Dashboard*).

c. Standardisasi Metadata: Mewajibkan seluruh produsen data untuk menyusun metadata yang standar sesuai dengan norma BPS guna menghilangkan duplikasi dan inkonsistensi data.

3. Penguatan Kedaulatan Digital dan Keamanan Informasi (Urusan Persandian)

a. Peningkatan Maturitas *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT): Menyelenggarakan simulasi penanganan insiden siber secara rutin (*Cyber Drill*) dan memperkuat kapasitas Tim Tanggap Insiden Siber agar mampu merespons ancaman secara *real-time*.

b. Perluasan Jangkauan Tanda Tangan Elektronik (TTE): Mengintegrasikan Tanda Tangan Elektronik (TTE) ke seluruh lini administrasi, hingga ke tingkat desa/kelurahan, untuk menjamin keutuhan dan keaslian dokumen pemerintah.

c. Uji Kerentanan Berkala: Melakukan *Vulnerability Assessment* dan *Penetration Testing* secara berkala terhadap seluruh aplikasi strategis sebelum dan sesudah operasional.

4. Langkah Strategis Manajemen Penunjang (Administrasi Umum)

a. Peningkatan Kapasitas SDM Spesifik: Mengalokasikan anggaran khusus untuk sertifikasi keahlian bagi staf, seperti sertifikasi Statistisi, Manggala Informatika, dan Programmer.

b. Digitalisasi Administrasi Perkantoran: Mengalihkan seluruh proses administrasi umum (surat-menyurat, pengarsipan, dan absensi) ke sistem *paperless* guna efisiensi biaya belanja cetak dan penggandaan.

c. Manajemen Pemeliharaan Preventif: Menerapkan sistem pemeliharaan aset berbasis aplikasi (e-Maintenance) untuk memastikan jadwal servis kendaraan dan perangkat TIK terpantau secara otomatis, sehingga mencegah kerusakan berat.

2.1 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap peniliaan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah, meliputi:

- Penilaian capaian IKU Tahun 2025 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta memperhatikan IKU pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- Penilaian capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Capaian IKU dan IKK Perangkat Daerah Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Bantul Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi				Target		
			2022	2023	2024	2025	2025	2026	2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I.	IKU sesuai Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026								
	a. Indeks Kualitas Layanan Informasi Publik	Indeks	83,81	84,25	84,38	84,62	84,5	-	-
	b. Nilai Indeks Pembangunan TIK	Indeks	6,944	7,036	7.30	7,61	7,5	-	-
	c. Nilai Tata kelola SPBE	Indeks	2,90	3,30	3,70	3,7	3,7	-	-
II.	IKU sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029								
	a. Tingkat kematangan	Indeks	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1,6	1,6

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi				Target		
			2022	2023	2024	2025	2025	2026	2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Aspek Keamanan Siber								
	b. Indeks Pembangunan Statistik	Indeks	n/a	n/a	n/a	n/a	3,01	3,05	3,05
	c. Indeks Kualitas Layanan Informasi Publik	Indeks	83,81	84,25	84,38	84,62	84,5	84,75	85
	d. Tingkat kematangan keamanan siber pemerintah digital	Indeks	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1,6	1,6
	e. Nilai Domain Prinsip Satu Data Indonesia	Indeks	n/a	n/a	n/a	n/a	3,25	3,27	3,27
	f. Tingkat kematangan Aspek Keamanan Siber	Indeks	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1,6	1,6
III.	IKK sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029								
	a. Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	n/a	n/a	n/a	n/a	98,5	98,6	98,7
	b. Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	100
	c. Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public	%	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	100

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi				Target		
			2022	2023	2024	2025	2025	2026	2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	access to fiscal information)								
	d. Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	%	n/a	n/a	n/a	n/a	96	97	98
	e. Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	100
	f. Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	100
	g. Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	100
	h. Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	n/a	n/a	n/a	91,83	91,83	90.20	92,00

Sesuai pencapaian IKU dan IKK Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 yang disajikan pada Tabel 2.3, dapat diketahui bahwa:

1. Pada Tahun 2025 ditetapkan 2 jenis IKU:
    a. IKU sesuai Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026,
    b. IKU sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
2. Tidak ada Indikator (IKU dan IKK) Dinas Komunikasi dan Informatika yang tidak dapat memenuhi target
3. Indikator (IKU dan IKK) yang dapat memenuhi target adalah:
    A. IKU sesuai Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
        a. Indeks Kualitas Layanan Informasi Publik
        b. Nilai Indeks Pembangunan TIK
        c. Nilai Tata kelola SPBE
    B. IKU sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
        a. Tingkat kematangan Aspek Keamanan Siber
        b. Indeks Pembangunan Statistik
        b. Indeks Kualitas Layanan Informasi Publik
        c. Tingkat kematangan keamanan siber pemerintah digital
        d. Nilai Domain Prinsip Satu Data Indonesia
        e. Tingkat kematangan Aspek Keamanan Siber
    C. IKK sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
        a. Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
        b. Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi
        c. Akses publik terhadap informasi keuangan daerah.
        d. Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan.

b. Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika
c. Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah
d. Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah
e. Tingkat keamanan informasi pemerintah

IKU dan IKK tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

1) Integrasi Sistem Pemantauan Real-Time: Penerapan arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terpadu mempercepat sinkronisasi data antar Perangkat Daerah, sehingga meminimalkan hambatan pelaporan dan mempercepat evaluasi berkala.
2) Optimalisasi Infrastruktur Jaringan dan Pusat Data: Perluasan cakupan akses internet dan penguatan infrastruktur keamanan siber yang tersentralisasi secara signifikan menekan kerentanan sistem dari ancaman eksternal sekaligus menjamin stabilitas layanan publik.
3) Standardisasi Tata Kelola Data dan Statistik: Penerapan prinsip Satu Data Indonesia yang konsisten memastikan validitas, konsistensi, dan ketertelusuran data sektoral, yang menjadi fondasi utama dalam perumusan kebijakan serta perencanaan pembangunan daerah.
4) Penguatan Aksesibilitas dan Transparansi Publik: Penyediaan kanal informasi publik yang adaptif dan inklusif mempermudah pemangku kepentingan dalam memantau tata kelola keuangan serta kualitas pelayanan publik secara transparan.

Sesuai hasil analisis terhadap IKU dan IKK Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 tersebut, maka langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan pada Tahun 2027 supaya seluruh IKU dan IKK yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Tata Kelola Pemerintahan Digital dan SPBE
    a) Akselerasi Integrasi Layanan Publik Nyata: Menghentikan pembangunan aplikasi baru yang parsial dan berfokus pada penggabungan (*konsolidasi*) aplikasi layanan publik yang ada ke dalam satu portal pelayanan publik daerah yang terpadu.
    b) Penguatan Evaluasi Internal Mandiri SPBE: Melakukan audit teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta evaluasi mandiri secara berkala sebelum penilaian nasional, guna mendeteksi celah pada domain tata kelola dan manajemen SPBE.
2. Keamanan Siber dan Informasi
    a) Standardisasi Keamanan Informasi (ISO 27001): Menerapkan standar manajemen keamanan informasi pada sistem elektronik strategis daerah dan membentuk *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT) yang tersertifikasi secara penuh di tingkat kabupaten/kota.
    b) Audit Penetrasi Berkala (*Vulnerability Assessment*): Melakukan uji penetrasi (*pentest*) secara rutin terhadap seluruh sistem informasi kedinasan dan infrastruktur jaringan guna memitigasi risiko kebocoran data pemerintah.
3. Implementasi Satu Data Indonesia dan Statistik Sektoral
    a) Penguatan Peran Forum Satu Data Daerah: Mengoptimalkan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Walidata dengan menetapkan standar data, metadata, dan kode referensi yang wajib dipatuhi oleh seluruh Perangkat Daerah sebagai Produsen Data.
    b) Peningkatan Literasi Data Perangkat Daerah: Menyelenggarakan bimbingan teknis intensif mengenai pemanfaatan data statistik sektoral untuk penyusunan dokumen perencanaan (RPJMD/RKPD) dan evaluasi pembangunan daerah.

4. Diseminasi Informasi Publik dan Transparansi
   a) Digitalisasi Informasi Keuangan dan Layanan Dasar: Menyediakan dasbor publik yang interaktif untuk mempermudah akses masyarakat terhadap informasi fiskal daerah, serapan anggaran, serta capaian kinerja unit pelayanan garda depan (*frontline services*).
   b) Diversifikasi Kanal dan Segmentasi Informasi: Mengembangkan strategi komunikasi publik berbasis multimedia (termasuk optimalisasi konten digital pendek) untuk menyebarluaskan program prioritas pemerintah secara inklusif hingga ke tingkat desa/kelurahan.
5. Optimalisasi Infrastruktur Jaringan

   Pemerataan Jaringan Intra Pemerintah: Meningkatkan kapasitas *bandwidth* dan memastikan interkoneksi jaringan kabel serat optik (*fiber optic*) atau jaringan aman mandiri telah terhubung ke seluruh Perangkat Daerah dan kecamatan tanpa *blank spot*.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik, dan Urusan Persandian. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut, ditemui kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan pada Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.4
Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2025

Kekuatan	Kelemahan
Infrastruktur Dasar yang Terbangun: Tersedianya jaringan intra pemerintah daerah (jaringan tulang punggung/backbone) yang telah menghubungkan sebagian besar Perangkat Daerah serta kepemilikan ruang server (Data Center) daerah.	Masih banyaknya aplikasi pelayanan publik yang dibangun secara parsial antar-Perangkat Daerah dan belum terintegrasi ke dalam satu pintu.
Regulasi Pendukung Mandat SPBE: Adanya payung hukum daerah yang kuat terkait tata kelola Sistem Pemerintahan	Kesenjangan Kualitas Infrastruktur: Kapasitas bandwidth dan stabilitas jaringan antar-wilayah kerja belum

Kekuatan	Kelemahan
Berbasis Elektronik (SPBE) dan keterbukaan informasi publik.	merata, terutama untuk unit kerja garda depan di tingkat kecamatan/kelurahan.
Ketersediaan Saluran Kanal Komunikasi Resmi: Memiliki kendali penuh atas media diseminasi informasi pemerintah mulai dari portal web resmi, media sosial pemerintah, hingga kerja sama media massa.	Keterbatasan SDM Pranata Komputer/Pranata Humas Spesialis: Kurangnya tenaga fungsional keahlian khusus seperti programmer, analis sistem, dan kreator konten strategis dan aparatur yang memiliki sertifikasi keahlian di bidang forensik digital, audit keamanan TIK, dan penanganan insiden siber. yang berstatus ASN.
Ketersediaan Portal Data Terbuka: Adanya platform Open Data atau portal data sektoral yang siap dikembangkan menjadi basis data terpadu.	Pemanfaatan Data Belum Optimal: Data statistik yang tersedia belum sepenuhnya dijadikan rujukan utama oleh Perangkat Daerah dalam melakukan evaluasi dan perencanaan pembangunan.
Adanya Fungsi Pengawasan Keamanan Sistem: Tersedianya instrumen dasar untuk melakukan Vulnerability Assessment (uji kerentanan) secara internal pada sistem aplikasi daerah.	

Tabel 2.5
Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2025

Peluang	Tantangan
Tingginya Penetrasi Penggunaan Internet Masyarakat: Tingkat adopsi digital masyarakat yang tinggi mempermudah perluasan jangkauan layanan publik online dan diseminasi program prioritas.	Meningkatnya tuntutan masyarakat akan pelayanan informasi publik yang instan, transparan, dan bebas hambatan (*seamless*).
Kebijakan Digitalisasi Nasional: Adanya dukungan teknis dan arsitektur aplikasi berbagi pakai dari pemerintah pusat guna mempercepat integrasi sistem daerah.	Pengembangan jaringan *Fiber Optic* menghadapi tantangan utama dalam penataan tata ruang kota dan keberlanjutan lingkungan, yang memerlukan solusi kolaboratif melalui pemanfaatan kabel bawah tanah (*joint ducting*), teknologi ramah lingkungan, serta skema berbagi infrastruktur (*infrastructure sharing*).
Mandat Penguatan Satu Data Indonesia (SDI): Momentum nasional dalam penataan tata kelola data untuk menghasilkan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*).	Kecepatan Perkembangan Teknologi: Dinamika platform digital yang sangat cepat menuntut adaptasi infrastruktur dan regulasi daerah secara konstan agar tidak usang.
Kolaborasi Bersama BPS: Peluang bimbingan teknis dan sinergi yang luas dengan Badan Pusat Statistik (BPS) selaku Pembina Data.	Tingginya Risiko Inkonsistensi Data: Perbedaan metodologi pengumpulan data antar-instansi berpotensi menghasilkan data yang tumpang tindih untuk objek pembangunan yang sama.

Peluang	Tantangan
Fasilitasi Eksklusif dari BSSN: Adanya dukungan asistensi, koordinasi, dan pemantauan ancaman siber secara nasional dari Badan Siber dan Sandi Negara.	Eskalasi Serangan Siber: Meningkatnya kuantitas dan kecanggihan serangan siber (*malware, ransomware, phishing*) yang menargetkan pusat data dan pelaporan keuangan daerah.
	Kelemahan Proteksi pada Sisi Pengguna: Kerentanan keamanan yang disebabkan oleh rendahnya kesadaran digital (digital literacy) para operator aplikasi di lingkungan Perangkat Daerah (human error).

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2025, maka strategi pada Tahun 2027 yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Strategi Agresif/Pertumbuhan (SO - *Strengths-Opportunities*)
   a. Akselerasi Integrasi SPBE dan Portal Layanan Publik Terpadu: Memanfaatkan regulasi SPBE yang kuat dan tingginya adopsi internet masyarakat untuk mengonsolidasikan seluruh aplikasi layanan publik sektoral yang terpisah ke dalam satu portal pelayanan publik daerah yang terpadu dan berbagi pakai.
   b. Penguatan Peran Walidata Melalui Satu Data Daerah: Mengoptimalkan kewenangan legal Dinas Kominfo sebagai Walidata dan momentum nasional Satu Data Indonesia untuk memperluas integrasi basis data pembangunan sektoral yang valid melalui kolaborasi intensif bersama BPS sebagai Pembina Data.
   c. Peningkatan Kapasitas CSIRT (*Computer Security Incident Response Team*) Berbasis Asistensi Pusat: Memanfaatkan dukungan asistensi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk meningkatkan level kematangan *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT) daerah melalui sertifikasi personel dan sistem.
2. Strategi Perbaikan Internal (WO - *Weaknesses-Opportunities*)
   a. Standardisasi Data Sektoral Melalui Pemanfaatan Platform Nasional: Mengatasi rendahnya metadata dan standardisasi data di Perangkat Daerah dengan menerapkan instrumen baku dari Forum Satu Data Indonesia, guna mengikis ego sektoral dan menghasilkan data perencanaan yang akurat.

b. Peningkatan Literasi Digital dan Pemanfaatan Data Perangkat Daerah: Memanfaatkan momentum digitalisasi nasional untuk menyelenggarakan bimbingan teknis masif bagi aparatur daerah, guna mengatasi keterbatasan kompetensi TIK dan mengoptimalkan penggunaan data statistik dalam perencanaan serta evaluasi pembangunan.
c. Pemberdayaan Infrastruktur Digital Berbagi Pakai: Mengurangi kesenjangan kualitas infrastruktur antar-wilayah dengan memanfaatkan arsitektur aplikasi dan Pusat Data Nasional (PDN) guna menjamin kestabilan layanan publik di unit kerja garda depan.

3. Strategi Diversifikasi / Perlindungan (ST - *Strengths-Threats*)
a. Penerapan Standardisasi ISO 27001 dan Audit Penetrasi Sistem Berkala: Memanfaatkan fungsi pengawasan keamanan internal untuk menangkal eskalasi serangan siber (*ransomware* dan kebocoran data) dengan menerapkan standar manajemen keamanan informasi baku pada sistem elektronik strategis daerah.
b. Modernisasi Kanal Komunikasi dan Komunikasi Publik Multimedia: Mengoptimalkan eksistensi portal resmi dan PPID guna merespons tingginya ekspektasi publik terhadap kecepatan informasi melalui diversifikasi konten digital yang interaktif dan berbasis multimedia.

4. Strategi Defensif / Penyelamatan (WT - *Weaknesses-Threats*)
a. Pembatasan Aplikasi Baru dan Penguatan Regulasi Keamanan Bersama: Menghentikan pembangunan aplikasi parsial baru guna menekan kerentanan sistem dari serangan siber akibat kurangnya SDM ahli, sekaligus memperketat standar operasional prosedur (SOP) akses data bagi operator Perangkat Daerah untuk mencegah *human error*.
b. Skala Prioritas Alokasi Bandwidth dan Sarana Keamanan Digital: Mengatasi keterbatasan anggaran dan alat *cyber security* dengan memprioritaskan kestabilan jaringan jaringan intra pemerintah serta proteksi berlapis pada sistem elektronik kedinasan yang mengelola data keuangan dan pelayanan langsung masyarakat.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2027

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2027. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.6

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027

Nama Perangkat Daerah: Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2.16 -	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				22.156.026.384	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				22.156.026.384	
2.16.02 -	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Kab. Bantul			2.018.448.898	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Kab. Bantul			2.018.448.898	
	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Kab. Bantul	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	98,70	2.018.448.898	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Kab. Bantul	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	98,70	2.018.448.898	
2.16.02.2.01 -	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul			2.018.448.898	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul			2.018.448.898	
	Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul	Kab. Bantul	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis		2.018.448.898	Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul	Kab. Bantul	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis		2.018.448.898	
2.16.02.2.01.0015 -	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Kab. Bantul			510.935.000	2.16.02.2.01.0015 - Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Kab. Bantul			510.935.000	

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Kab. Bantul	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	65	510.935.000	Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Kab. Bantul	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	65	510.935.000	
2.16.02.2.01.0017 -	Pelayanan Informasi Publik	Kab. Bantul			84.574.500	2.16.02.2.01.0017 - Pelayanan Informasi Publik	Kab. Bantul			84.574.500	
	Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Kab. Bantul	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	20	84.574.500	Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Kab. Bantul	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	20	84.574.500	
2.16.02.2.01.0019 -	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Kab. Bantul			450.385.000	2.16.02.2.01.0019 - Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Kab. Bantul			450.385.000	
	Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Kab. Bantul	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	12	450.385.000	Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Kab. Bantul	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	12	450.385.000	
2.16.02.2.01.0021 -	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kab. Bantul			972.554.398	2.16.02.2.01.0021 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kab. Bantul			972.554.398	
	Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kab. Bantul	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	12	972.554.398	Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kab. Bantul	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	12	972.554.398	
2.16.03 -	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Kab. Bantul			12.786.277.337	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Kab. Bantul			12.786.277.337	

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Kab. Bantul	Tingkat kematangan pembangunan/pengembangan aplikasi	1.6	12.786.277.337	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Kab. Bantul	Tingkat kematangan pembangunan/pengembangan aplikasi	1.6	12.786.277.337	
		Kab. Bantul	Tingkat kematangan layanan jaringan intra pemerintah	1.6			Kab. Bantul	Tingkat kematangan layanan jaringan intra pemerintah	1.6		
2.16.03.2.02 -	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul			12.786.277.337	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul			12.786.277.337	
	Meningkatnya Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul	Kab. Bantul			12.786.277.337	Meningkatnya Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul	Kab. Bantul			12.786.277.337	
2.16.03.2.02.0024 -	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kab. Bantul			6.786.688.554	2.16.03.2.02.0024 - Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kab. Bantul			6.786.688.554	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kab. Bantul	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	45	6.786.688.554	Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kab. Bantul	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	45	6.786.688.554	
2.16.03.2.02.0032 -	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Kab. Bantul			786.439.500	2.16.03.2.02.0032 - Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Kab. Bantul			786.439.500	
	Terlaksananya pembangunan dan/atau	Kab. Bantul	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau	25	786.439.500	Terlaksananya pembangunan dan/atau	Kab. Bantul	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau	25	786.439.500	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE		dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE			pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE		dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE			
2.16.03.2.02.0033 -	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Kab. Bantul			3.705.198.250	2.16.03.2.02.0033 - Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Kab. Bantul			3.705.198.250	
	Terlaksananya penyelenggaraan pusat kendali pemerintah daerah	Kab. Bantul	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali	2	3.705.198.250	Terlaksananya penyelenggaraan pusat kendali pemerintah daerah	Kab. Bantul	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali	2	3.705.198.250	
2.16.03.2.02.0034 -	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan	Kab. Bantul			601.717.875	2.16.03.2.02.0034 - Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan	Kab. Bantul			601.717.875	
	Terlaksananya Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	18	601.717.875	Terlaksananya Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	18	601.717.875	
2.16.03.2.02.0036 -	Penyediaan Akses Internet	Kab. Bantul			469.831.533	2.16.03.2.02.0036 - Penyediaan Akses Internet	Kab. Bantul			469.831.533	
	Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Kab. Bantul	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	17	469.831.533	Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Kab. Bantul	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	17	469.831.533	
2.16.03.2.	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi	Kab. Bantul			278.293.950	2.16.03.2.02.0037 - Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola	Kab. Bantul			278.293.950	

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
02.00 37 -	arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah					SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah					
	Terlaksananya koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Kab. Bantul	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	1	278.293.950	Terlaksananya koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Kab. Bantul	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	1	278.293.950	
2.16. 03.2. 02.00 38 -	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Kab. Bantul			158.107.675	2.16.03.2.02.0038 - Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Kab. Bantul			158.107.675	
	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Kab. Bantul	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	1	158.107.675	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Kab. Bantul	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	1	158.107.675	
2.16. 01 -	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Bantul			7.351.300.149	2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Bantul			7.351.300.149	
	Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Kab. Bantul	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	94.4	7.351.300.149	Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Kab. Bantul	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	94.4	7.351.300.149	
		Kab. Bantul	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	81.7			Kab. Bantul	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	81.7		
2.16. 01.2. 01 -	Perencanaan, Penganggaran, dan	Kab. Bantul			24.367.500	2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan	Kab. Bantul			24.367.500	

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
	Terwujudnya laporan capaian kinerja keuangan, data serta bahan evaluasi untuk akuntabilitas Perangkat Daerah	Kab. Bantul			24.367.500	Terwujudnya laporan capaian kinerja keuangan, data serta bahan evaluasi untuk akuntabilitas Perangkat Daerah	Kab. Bantul			24.367.500	
2.16.01.2.01.0001 -	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul			9.850.000	2.16.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul			9.850.000	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	9.850.000	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	9.850.000	
2.16.01.2.01.0007 -	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul			14.517.500	2.16.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul			14.517.500	
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16	14.517.500	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16	14.517.500	
2.16.01.2.02 -	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul			6.262.919.767	2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul			6.262.919.767	
	Terwujudnya sistem administrasi Keuangan yang akuntabel, tertib dan lancar	Kab. Bantul			6.262.919.767	Terwujudnya sistem administrasi Keuangan yang akuntabel, tertib dan lancar	Kab. Bantul			6.262.919.767	
2.16.01.2.02.0001 -	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul			6.106.619.767	2.16.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul			6.106.619.767	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54	6.106.619.767	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54	6.106.619.767	
2.16.01.2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bantul			152.220.000	2.16.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bantul			152.220.000	

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
02.0002 -											
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	152.220.000	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	152.220.000	
2.16.01.2.02.0007 -	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Bantul			4.080.000	2.16.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Bantul			4.080.000	
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	4.080.000	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	4.080.000	
2.16.01.2.03 -	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Bantul			4.037.500	2.16.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Bantul			4.037.500	
	Terwujudnya sistem administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang akuntabel, tertib dan lancar	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		4.037.500	Terwujudnya sistem administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang akuntabel, tertib dan lancar	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		4.037.500	
2.16.01.2.03.0004 -	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bantul			4.037.500	2.16.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bantul			4.037.500	
	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12	4.037.500	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12	4.037.500	

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2.16.01.2.05 -	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bantul			19.960.000	2.16.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bantul			19.960.000	
	Terwujudnya sistem administrasi kepegawaian yang akuntabel, tertib dan lancar	Kab. Bantul			19.960.000	Terwujudnya sistem administrasi kepegawaian yang akuntabel, tertib dan lancar	Kab. Bantul			19.960.000	
2.16.01.2.05.0005 -	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Bantul			19.960.000	2.16.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Bantul			19.960.000	
	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12	19.960.000	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12	19.960.000	
2.16.01.2.06 -	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul			333.699.522	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul			333.699.522	
	Terwujudnya sistem administrasi umum yang akuntabel, tertib dan lancar	Kab. Bantul			333.699.522	Terwujudnya sistem administrasi umum yang akuntabel, tertib dan lancar	Kab. Bantul			333.699.522	
2.16.01.2.06.0001 -	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bantul			11.984.690	2.16.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bantul			11.984.690	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	13	11.984.690	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	13	11.984.690	
2.16.01.2.06.0002 -	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul			99.800.000	2.16.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul			99.800.000	

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8	99.800.000	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8	99.800.000	
2.16.01.2.06.0003 -	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul			18.476.732	2.16.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul			18.476.732	
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7	18.476.732	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7	18.476.732	
2.16.01.2.06.0005 -	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul			3.862.100	2.16.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul			3.862.100	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	3.862.100	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	3.862.100	
2.16.01.2.06.0006 -	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul			4.500.000	2.16.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul			4.500.000	
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3	4.500.000	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3	4.500.000	
2.16.01.2.06.0008 -	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bantul			7.862.500	2.16.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bantul			7.862.500	
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	7.862.500	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	7.862.500	
2.16.01.2.06.0009 -	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul			179.521.000	2.16.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul			179.521.000	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	12	179.521.000	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	12	179.521.000	

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
2.16.01.2.06.0010 -	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bantul			4.037.500	2.16.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bantul			4.037.500	
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	4.037.500	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	4.037.500	
2.16.01.2.06.0011 -	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Bantul			3.655.000	2.16.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Bantul			3.655.000	
	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12	3.655.000	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12	3.655.000	
2.16.01.2.08-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul			338.815.860	2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul			338.815.860	
	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		338.815.860	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		338.815.860	
2.16.01.2.08.0001 -	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul			7.236.000	2.16.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul			7.236.000	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	7.236.000	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	7.236.000	
2.16.01.2.08.0002 -	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul			30.000.000	2.16.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul			30.000.000	

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	30.000.000	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	30.000.000	
2.16.01.2.08.0003 -	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul			24.971.220	2.16.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul			24.971.220	
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	24.971.220	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	24.971.220	
2.16.01.2.08.0004 -	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul			276.608.640	2.16.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul			276.608.640	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	276.608.640	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	276.608.640	
2.16.01.2.09 -	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul			367.500.000	2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul			367.500.000	
	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Bantul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		367.500.000	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Bantul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		367.500.000	
2.16.01.2.09.0001 -	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bantul			214.150.000	2.16.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bantul			214.150.000	

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bantul	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17	214.150.000	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bantul	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17	214.150.000	
2.16.01.2.09.0006 -	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul			89.700.000	2.16.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul			89.700.000	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	186	89.700.000	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	186	89.700.000	
2.16.01.2.09.0009 -	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bantul			63.650.000	2.16.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bantul			63.650.000	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	63.650.000	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	63.650.000	
2.21 -	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Kab. Bantul			1.205.154.766	2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Kab. Bantul			1.205.154.766	
2.21.02 -	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Kab. Bantul			1.205.154.766	2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Kab. Bantul			1.205.154.766	
	Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi di Lingkungan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul	Tingkat keamanan informasi pemerintah	96.6	1.205.154.766	Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi di Lingkungan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul	Tingkat keamanan informasi pemerintah	96.6	1.205.154.766	
2.21.02.2.01 -	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul			778.081.220	2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul			778.081.220	

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Terselenggaranya Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul	Kab. Bantul	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian		778.081.220	Terselenggaranya Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul	Kab. Bantul	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian		778.081.220	
2.21. 02.2. 01.00 07 -	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Kab. Bantul			778.081.220	2.21.02.2.01.0007 - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Kab. Bantul			778.081.220	
	Tersedianya Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	45	778.081.220	Tersedianya Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	45	778.081.220	
2.21. 02.2. 02 -	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul			427.073.546	2.21.02.2.02 - Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul			427.073.546	
	Terlaksananya Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten Bantul	Kab. Bantul	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.		427.073.546	Terlaksananya Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten Bantul	Kab. Bantul	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.		427.073.546	
2.21. 02.2. 02.00 02 -	Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Kab. Bantul			427.073.546	2.21.02.2.02.0002 - Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Kab. Bantul			427.073.546	
	Terlaksananya Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan	45	427.073.546	Terlaksananya Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan	45	427.073.546	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			komunikasi sandi pemerintah Daerah.					komunikasi sandi pemerintah Daerah.			
2.22 -	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Kab. Bantul			200.000.000	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Kab. Bantul			200.000.000	
2.22.08 -	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	Kab. Bantul			200.000.000	2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	Kab. Bantul			200.000.000	
	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di masyarakat	Kab. Bantul	Indeks Teknologi Informasi dan Komunikasi	2.55	200.000.000	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di masyarakat	Kab. Bantul	Indeks Teknologi Informasi dan Komunikasi	2.55	100.000.000	
2.22.08.5.04 -	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Kab. Bantul			200.000.000	2.22.08.5.04 - Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Kab. Bantul			100.000.000	
	Terlaksananya pembangunan Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan di Kabupaten Bantul	Kab. Bantul			200.000.000	Terlaksananya pembangunan Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan di Kabupaten Bantul	Kab. Bantul			100.000.000	
2.22.08.5.04.0002 -	Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital	Kab. Bantul			200.000.000	2.22.08.5.04.0002 - Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital	Kab. Bantul			100.000.000	
	Terlaksananya Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital	Kab. Bantul	Jumlah Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital yang Dibangun	6	200.000.000	Terlaksananya Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital	Kab. Bantul	Jumlah Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital yang Dibangun	6	200.000.000	
		Kab. Bantul	Nilai Domain Prinsip Satu Data Indonesia	3,27			Kab. Bantul	Nilai Domain Prinsip Satu Data Indonesia	3,27		
2.20 -	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Kab. Bantul			381.959.934	2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Kab. Bantul			381.959.934	
2.20.02 -	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Kab. Bantul			381.959.934	2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Kab. Bantul			381.959.934	

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Kab. Bantul	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100	381.959.934	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Kab. Bantul	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100	381.959.934	
		Kab. Bantul	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100			Kab. Bantul	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100		
2.20.02.2.01 -	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul			381.959.934	2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul			381.959.934	
	Meningkatnya kualitas, aksesibilitas, dan pemanfaatan data statistik sektoral yang akurat dan terstandarisasi untuk mendukung perencanaan pembangunan, pengambilan keputusan, dan pelayanan publik yang berbasis data	Kab. Bantul			381.959.934	Meningkatnya kualitas, aksesibilitas, dan pemanfaatan data statistik sektoral yang akurat dan terstandarisasi untuk mendukung perencanaan pembangunan, pengambilan keputusan, dan pelayanan publik yang berbasis data	Kab. Bantul			381.959.934	
2.20.02.2.01.0018 -	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Kab. Bantul			254.639.934	2.20.02.2.01.0018 - Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Kab. Bantul			254.639.934	
	Tersedianya Statistik Sektoral yang memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia	Kab. Bantul	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	100	254.639.934	Tersedianya Statistik Sektoral yang memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia	Kab. Bantul	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	100	254.639.934	

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2.20.02.2.01.0021 -	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Kab. Bantul			127.320.000	2.20.02.2.01.0021 - Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Kab. Bantul			127.320.000	
	Terlaksananya Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Kab. Bantul	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	100	127.320.000	Terlaksananya Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Kab. Bantul	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	100	127.320.000	
					23,943,141,084					**23,843,141,084**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2027, dilakukan pula telaah terhadap usulan masyarakat. Penelaahan usulan masyarakat merupakan salah satu wujud pendekatan *bottom-up planning*. Penelaahan usulan masyarakat dilakukan melalui penyelarasan usulan masyarakat yang telah diperoleh dalam musrenbang kapanewon, forum perangkat daerah, maupun musrenbang kabupaten dengan tema dan prioritas daerah Tahun 2027 serta tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan hasil penelaahan usulan masyarakat, usulan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7
Usulan Kegiatan yang diusulkan oleh Para Pemangku Kepentingan/Masyarakat Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Usulan	Lokasi	Volume	Satuan	Catatan
1.	Pelatihan/ Bimbingan Teknis Cakap Digital	Kalurahan Tirtonirmolo, Kab. Bantul	1	paket	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaah kebijakan nasional Tahun 2027 dilakukan terhadap Rancangan RKP Tahun 2027 yang telah ditetapkan dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027. Tema Pembangunan Nasional dalam Rancangan RKP Tahun 2027 adalah **"Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri"** yang dilaksanakan melalui 8 klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) dengan fondasi Pertahanan dan Keamanan, Penegakan Hukum, Tata Kelola, Digitalisasi, dan Diplomasi Ekonomi.



Sumber: Rancangan RKP Tahun 2027

Gambar 3.1 Kerangka Pikir Tema RKP 2027

Dalam rangka mendukung kebijakan nasional Tahun 2027 tersebut, maka langkah strategis yang akan ditempuh oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Akselerasi Keterpaduan Layanan Digital dan Arsitektur SPBE Nasional
   a. Migrasi dan Konsolidasi ke Pusat Data Nasional (PDN): Melakukan migrasi sistem aplikasi dan basis data daerah ke infrastruktur Pusat Data Nasional secara bertahap guna mendukung efisiensi anggaran dan standardisasi keamanan infrastruktur.
   b. Penerapan Aplikasi Berbagi Pakai dan API Standardisasi: Menghentikan pembangunan aplikasi lokal yang bersifat sektoral dan beralih menggunakan aplikasi berbagi pakai nasional (*shared services*) serta mengintegrasikan layanan daerah ke portal pelayanan publik nasional (Portal Nasional) menggunakan arsitektur *Application Programming Interface* (API) yang terstandardisasi.
   c. Implementasi Sistem Identitas Digital Terintegrasi: Menerapkan pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau Digital ID nasional sebagai instrumen utama autentikasi dalam seluruh akses layanan publik digital daerah untuk menciptakan layanan yang nirlayan (*seamless*).
2. Penguatan Ketahanan Siber dan Keamanan Informasi Nasional
   a. Peningkatan Level Kematangan Keamanan Siber *(Cybersecurity Maturity):* Meningkatkan indeks kematangan keamanan siber pemerintah daerah melalui pemenuhan instrumen evaluasi BSSN, serta memperkuat operasional *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT) yang terhubung dengan *National* CSIRT.
   b. Penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE) Tersertifikasi Menyeluruh: Memperluas pemanfaatan TTE tersertifikasi BSrE hingga ke tingkat kelurahan/desa dan unit pelayanan garda depan untuk menjamin keabsahan hukum, akuntabilitas, dan keamanan dokumen administrasi pemerintahan.

3. Perwujudan Satu Data Indonesia dan Implementasi Kecerdasan Artifisial (AI) Tata Kelola
   a. Standardisasi Interoperabilitas Data Nasional: Menerapkan secara ketat prinsip Satu Data Indonesia (SDI) melalui pemenuhan komponen data, metadata standar, dan kode referensi nasional agar data statistik sektoral daerah dapat langsung terintegrasi dengan Portal Satu Data Indonesia.
   b. Pemanfaatan Data *Analytics* dan AI untuk Pengambilan Kebijakan: Mulai mengadopsi teknologi *data analytics* dan kecerdasan artifisial (AI) skala mikro pada pengelolaan data statistik daerah untuk menghasilkan analisis prediktif yang mendukung kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) bagi pimpinan daerah.
4. Transformasi Komunikasi Publik dan Literasi Digital Inklusif
   a. Strategi Komunikasi Publik Berbasis Counter-Narasi dan Anti-*Hoaks:* Memperkuat fungsi penyaringan informasi dan edukasi literasi digital publik guna menangkal persebaran hoaks, disinformasi, dan judi online di tingkat lokal yang mengancam stabilitas ruang digital nasional.
   b. Diseminasi Informasi Program Strategis Nasional (PSN): Mengoptimalkan kanal media pemerintah daerah untuk mengondisikan pencapaian target-target program prioritas nasional di daerah (seperti penanggulangan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, dan pertumbuhan ekonomi digital) agar diketahui dan didukung penuh oleh masyarakat.
5. Penguatan Ekosistem Satu Data Indonesia (SDI) Tingkat Daerah
   a. Penerapan Sanksi dan Insentif Kepatuhan Data (*Data Compliance*): Menyusun dan menerapkan mekanisme pemantauan kepatuhan Perangkat Daerah (sebagai Produsen Data) dalam menyusun instrumen SDI, termasuk pemberian rapor kinerja data dalam evaluasi SAKIP daerah.
   b. Penyusunan Daftar Data Terbuka dan Data Dikecualikan yang Valid: Menetapkan secara formal melalui Keputusan Kepala Daerah mengenai Daftar Data yang dipublikasikan (melalui portal *Open Data*)

dan Daftar Data yang Dikecualikan (bersifat rahasia/terbatas) berdasarkan pengujian konsekuensi bersama PPID, guna menjamin kepastian hukum bagi masyarakat dan instansi pemerintah.

c. Otomatisasi Validasi dan Interoperabilitas Data Melalui *Government Service Bus* (GSB): Membangun atau mengoptimalkan sistem penghubung layanan pemerintah daerah yang mendeteksi secara otomatis kelayakan data (kesesuaian format, ketersediaan metadata, dan ketiadaan data ganda) sebelum ditayangkan ke Portal Satu Data Daerah.

d. Sinkronisasi *Bagi Pakai Data* untuk Penanganan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting: Memfokuskan integrasi data sektoral pada pembersihan dan pemadanan data kemiskinan serta data kesehatan keluarga, sehingga tercipta satu basis data spasial tunggal yang menjadi rujukan intervensi anggaran bagi seluruh Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rumusan tema pembangunan dalam RKPD Kabupaten Bantul 2027 adalah **"Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Industri, dan Pariwisata didukung SDM Berkualitas"** dengan Prioritas Daerah (PD) sebagai berikut:

PD-1: Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia.

PD-2: Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.

PD-3: Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi.

PD-4: Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana.

PD-5: Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2027 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika serta tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029, maka

rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2027

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi 2025	Perkiraan realisasi 2026	Target 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatkan transformasi layanan publik berbasis digital yang aman, serta layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan		Tingkat kematangan Aspek Keamanan Siber	Indeks	n/a	1,6	1,6
			Indeks Pembangunan Statistik	Indeks	3,01	3,05	3,05
2		Meningkatnya Kualitas Layanan Komunikasi dan Informatika	Indeks Kualitas Layanan Informasi Publik	Indeks	84,5	84,75	85
			Tingkat kematangan keamanan siber pemerintah digital	Indeks	n/a	1,6	1,6
3		Meningkatnya Kualitas Layanan Statistik	Nilai Domain Prinsip Satu Data Indonesia	Indeks	3,25	3,27	3,27

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Tahun 2027 disusun dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Tahun 2027 yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Selain itu, rencana kerja dan pendanaan Tahun 2027 tersebut, juga mendukung salah satu program unggulan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 yaitu program penataan dan pengembangan kawasan pantai selatan dan restorasi kawasan gumuk pasir serta perluasan jaringan telekomunikasi untuk mendukung pengembangan layanan digital dan peningkatan keamanan.

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah yang berisi rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2027 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2027 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027 dan Prakiraan Maju Tahun 2028 Kabupaten Bantul

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Dinas Komunikasi dan Informatika						**20.721.915.809,00**							**23.624.944.690,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**20.721.915.809,00**							**23.624.944.690,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**						**19.368.254.553,00**							**22.263.375.871,00**	
1.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**9.143.017.993,00**							**7.380.701.987,00**	
		Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan						***9.140.017.993,00***							***7.376.664.487,00***	
			999.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	94.7 Indeks		94.3 Indeks	94.4 Indeks	9.140.017.993,00						94.5 Indeks	7.376.664.487,00	
			999.Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	82 Angka		81.6 Angka	81.7 Angka	9.140.017.993,00						81.8 Angka	7.376.664.487,00	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2.550.000,00					Dinas Komunikasi dan Informatika		24.367.500,00	
		Terwujudnya laporan capaian kinerja keuangan, data serta bahan evaluasi untuk akuntabilitas Perangkat Daerah						2.550.000,00					Dinas Komunikasi dan Informatika		24.367.500,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	2.000.000,00						4 Dokumen	9.850.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Laporan		16 Laporan	16 Laporan	550.000,00						16 Laporan	14.517.500,00	
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						2.000.000,00							9.850.000,00	

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Dokumen	9.850.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						550.000,00							14.517.500,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Laporan		16 Laporan	16 Laporan	550.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		16 Laporan	14.517.500,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						7.750.543.796,00					Aparatur Pengelola Keuangan dan Pegawai Perangkat Daerah		6.292.321.605,00	
		Terwujudnya sistem administrasi Keuangan yang akuntabel, tertib dan lancar						7.750.543.796,00					Aparatur Pengelola Keuangan dan Pegawai Perangkat Daerah		6.292.321.605,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	149.640.000,00						12 Dokumen	152.220.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw	18 Laporan		18 Laporan	18 Laporan	750.000,00						18 Laporan	4.080.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			ulanan/Semesteran SKPD													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54 Orang/bulan		54 Orang/bulan	54 Orang/bulan	7.600.153.796,00						54 Orang/bulan	6.136.021.605,00	
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						7.600.153.796,00							6.136.021.605,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54 Orang/bulan		54 Orang/bulan	54 Orang/bulan	7.600.153.796,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		54 Orang/bulan	6.136.021.605,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						149.640.000,00							152.220.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	149.640.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		12 Dokumen	152.220.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						750.000,00							4.080.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan		18 Laporan	18 Laporan	750.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		18 Laporan	4.080.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						750.000,00					Pengurus Barang, Pegawai Pemegang Aset, dan Unit Kerja Perangkat Daerah		4.037.500,00	
		Terwujudnya sistem administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang akuntabel, tertib dan lancar						750.000,00					Pengurus Barang, Pegawai Pemegang Aset, dan Unit Kerja Perangkat Daerah		4.037.500,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	750.000,00						12 Laporan	4.037.500,00	
	2.16.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD						750.000,00							4.037.500,00	
		Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	750.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		12 Laporan	4.037.500,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						750.000,00					Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai pada Perangkat Daerah		19.960.000,00	
		Terwujudnya sistem administrasi kepegawaian yang akuntabel, tertib dan lancar						750.000,00					Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai pada Perangkat Daerah		19.960.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	750.000,00						12 Dokumen	19.960.000,00	
	2.16.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						750.000,00							19.960.000,00	

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	750.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		12 Dokumen	19.960.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						141.531.534,00					Aparatur Perangkat Daerah dan Lembaga/Masyarakat Pengguna Layanan Administrasi Umum.		333.699.522,00	
		Terwujudnya sistem administrasi umum yang akuntabel, tertib dan lancar						141.531.534,00					Aparatur Perangkat Daerah dan Lembaga/Masyarakat Pengguna Layanan Administrasi Umum.		333.699.522,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	3.000.000,00						3 Dokumen	4.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	750.000,00						12 Dokumen	3.655.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	750.000,00						12 Dokumen	4.037.500,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	5.530.000,00						12 Laporan	7.862.500,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	89.350.000,00						12 Laporan	179.521.000,00	

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	2.654.300,00						2 Paket	3.862.100,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	13 Paket		13 Paket	13 Paket	12.505.990,00						13 Paket	11.984.690,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	8 Paket	15.300.000,00						8 Paket	99.800.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	7 Paket	11.691.244,00						7 Paket	18.476.732,00	
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						12.505.990,00							11.984.690,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	13 Paket		13 Paket	13 Paket	12.505.990,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		13 Paket	11.984.690,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						15.300.000,00							99.800.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	8 Paket	15.300.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		8 Paket	99.800.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						11.691.244,00							18.476.732,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	7 Paket	11.691.244,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		7 Paket	18.476.732,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						2.654.300,00							3.862.100,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	2.654.300,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		2 Paket	3.862.100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						3.000.000,00							4.500.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		3 Dokumen	4.500.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						5.530.000,00							7.862.500,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	5.530.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi,	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		12 Laporan	7.862.500,00	Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
											dan penyeludupan .					
	2.16.01.2 .06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						89.350.000,00							179.521.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	89.350.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		12 Laporan	179.521.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2 .06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						750.000,00							4.037.500,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	750.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		12 Dokumen	4.037.500,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2 .06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						750.000,00							3.655.000,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	750.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		12 Dokumen	3.655.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2 .08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						931.111.963,00					Aparatur Perangkat Daerah dan Penyedia Jasa Penunjang Operasional.		338.815.860,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah						931.111.963,00					Aparatur Perangkat Daerah dan Penyedia Jasa Penunjang Operasional.		338.815.860,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00						12 Laporan	30.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	883.330.218,00						12 Laporan	276.608.640,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	13.581.745,00						12 Laporan	24.971.220,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	4.200.000,00						12 Laporan	7.236.000,00	
	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						4.200.000,00							7.236.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	4.200.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		12 Laporan	7.236.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						30.000.000,00							30.000.000,00	

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		12 Laporan	30.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						13.581.745,00							24.971.220,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	13.581.745,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		12 Laporan	24.971.220,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						883.330.218,00							276.608.640,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	883.330.218,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		12 Laporan	276.608.640,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						315.780.700,00					Aparatur Pemegang Aset, Unit Kerja Perangkat Daerah, dan Penyedia Jasa Pemeliharaan		367.500.000,00	
		Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah						315.780.700,00					Aparatur Pemegang Aset, Unit Kerja Perangkat Daerah, dan Penyedia Jasa Pemeliharaan		367.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	51.540.000,00						1 Unit	63.650.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17 Unit		17 Unit	17 Unit	178.070.700,00						17 Unit	214.150.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	186 Unit		186 Unit	186 Unit	86.170.000,00						186 Unit	89.700.000,00	
	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						178.070.700,00							214.150.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17 Unit		17 Unit	17 Unit	178.070.700,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		17 Unit	214.150.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						86.170.000,00							89.700.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	186 Unit		186 Unit	186 Unit	86.170.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		186 Unit	89.700.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						51.540.000,00							63.650.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	51.540.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		1 Unit	63.650.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**						**1.279.469.500,00**							**2.026.521.771,00**	
		Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah						***1.279.469.500,00***							***2.026.521.771,00***	
			999.Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	99 %		98.6 %	98.7 %	1.279.469.500,00						98.8 %	2.026.521.771,00	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						1.279.469.500,00					Masyarakat Kabupaten Bantul, Media Massa, dan Perangkat Daerah Pemkab Bantul		2.026.521.771,00	
		Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul						1.279.469.500,00					Masyarakat Kabupaten Bantul, Media Massa, dan Perangkat Daerah Pemkab Bantul		2.026.521.771,00	
			Jumlah khalayak yang terpapar informasi publik	-		-	-	715.095.000,00						-	975.636.271,00	
			Jumlah Komunitas Informasi Masyarakat yang aktif mendiseminasi	-		-	-	206.400.000,00						-	512.850.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			kan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo													
			Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	-		-	-	325.700.000,00						-	452.450.000,00	
			Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	-		-	-	32.274.500,00						-	85.585.500,00	
	2.16.02.2.01.0025	Pelayanan Informasi Publik serta Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik						32.274.500,00							85.585.500,00	
		Tersedianya Pelayanan Informasi Publik bagi masyarakat dan terlaksananya Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	-		-	100 %	32.274.500,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		-	85.585.500,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.02.2.01.0026	Sosialisasi/Diseminasi Informasi serta Pengelolaan Media Komunikasi Publik						715.095.000,00							975.636.271,00	
		Terlaksananya Sosialisasi/Diseminasi Informasi serta Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah khalayak yang terpapar informasi publik	-		-	597213 Orang	715.095.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		-	975.636.271,00	Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
											penyeludupan.					
	2.16.02.2.01.0029	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini Publik, dan Aspirasi Publik						325.700.000,00							452.450.000,00	
		Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini Publik, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	-		-	12 Rekomendasi	325.700.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		-	452.450.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.02.2.01.0031	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat						206.400.000,00							512.850.000,00	
		Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Komunitas Informasi Masyarakat yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	-		-	65 Komunitas	206.400.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		-	512.850.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
3.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**						**8.945.767.060,00**							**12.856.152.113,00**	
		Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika						***8.945.767.060,00***							***12.856.152.113,00***	
			999.Tingkat kematangan layanan jaringan intra pemerintah	1.8 Angka		1.6 Angka	1.6 Angka	8.945.767.060,00						1.7 Angka	12.856.152.113,00	
			999.Tingkat kematangan pembangunan /pengembangan aplikasi	1.8 Angka		1.6 Angka	1.6 Angka	8.945.767.060,00						1.7 Angka	12.856.152.113,00	
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						8.945.767.060,00					Perangkat Daerah dan Masyarakat Kabupaten Bantul		12.856.152.113,00	
		Meningkatnya Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul						8.945.767.060,00					Perangkat Daerah dan Masyarakat Kabupaten Bantul		12.856.152.113,00	

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	105.060.000,00						1 Dokumen	158.107.675,00	
	2.16.03.2.02.0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas						105.060.000,00							158.107.675,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	1 Dokumen		1 Dokumen	12 Dokumen	105.060.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		1 Dokumen	158.107.675,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Meningkatnya Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul						8.945.767.060,00					Perangkat Daerah dan Masyarakat Kabupaten Bantul		12.856.152.113,00	
			Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Ekosistem Pusat Data Nasional dan laporan operasionalisasi pusat kendali	-		-	-	5.167.400.000,00						-	3.705.198.250,00	
			Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE yang meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, rencana dan anggaran, manajemem SPBE (Pemerintah Digital), serta hasil Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	-		-	-	111.300.000,00						-	278.293.950,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	-		-	-	526.950.000,00						-	601.717.875,00	
			Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	-		-	-	629.240.000,00						-	786.439.500,00	
			Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	-		-	-	594.388.500,00						-	469.831.533,00	
			Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	-		-	-	1.811.428.560,00						-	6.856.563.330,00	
	2.16.03.2.02.0035	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE						526.950.000,00							601.717.875,00	
		Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Promosi literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	-		-	1 Laporan	526.950.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		-	601.717.875,00	Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
											penyeludupan .					
	2.16.03.2 .02.0040	Penyediaan Akses Internet						594.388.500,00							469.831.533,00	
		Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dan UPTD, termasuk ruang publik dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	-		-	62 Titik	594.388.500,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		-	469.831.533,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.03.2 .02.0041	Koordinasi Pelaksanaan SPBE (Pemerintah Digital) yang meliputi tata kelola, manajemen SPBE, dan Audit TIK						111.300.000,00							278.293.950,00	
		Terlaksananya koordinasi Pelaksanaan SPBE (Pemerintah Digital) yang meliputi tata kelola, manajemen SPBE, dan Audit TIK	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE yang meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, rencana dan anggaran, manajemem SPBE (Pemerintah Digital), serta hasil Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	-		-	1 Dokumen	111.300.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		-	278.293.950,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.03.2 .02.0042	Koordinasi pengelolaan aplikasi, data/informasi, dan layanan pemerintah daerah berbasis elektronik yang terintegrasi						629.240.000,00							786.439.500,00	
		Terlaksananya pengelolaan aplikasi, data/informasi, dan layanan pemerintah daerah berbasis elektronik yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau	-		-	25 Layanan	629.240.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		-	786.439.500,00	Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Portal Data Nasional													
	2.16.03.2.02.0043	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota						1.811.428.560,00							6.856.563.330,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	-		-	45 Titik	1.811.428.560,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		-	6.856.563.330,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.03.2.02.0044	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional dan Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah						5.167.400.000,00							3.705.198.250,00	
		Terlaksananya koordinasi dalam rangka pemanfaatan Ekosistem Pusat Data Nasional dan Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Ekosistem Pusat Data Nasional dan laporan operasionalisasi pusat kendali	-		-	2 Aplikasi	5.167.400.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		-	3.705.198.250,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**						**192.500.000,00**							**383.487.599,00**	
4.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**						**192.500.000,00**							**383.487.599,00**	
		Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)						***192.500.000,00***							***383.487.599,00***	
			999.Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi	100 %		100 %	100 %	192.500.000,00						100 %	383.487.599,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			pembangunan daerah													
			999.Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100 %		100 %	100 %	192.500.000,00						100 %	383.487.599,00	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						192.500.000,00					Perangkat Daerah Selaku Produsen Data, Lembaga Pembina/Walidata, dan Masyarakat Pengguna Data.		383.487.599,00	
		Meningkatnya kualitas, aksesibilitas, dan pemanfaatan data statistik sektoral yang akurat dan terstandarisasi untuk mendukung perencanaan pembangunan, pengambilan keputusan, dan pelayanan publik yang berbasis data						192.500.000,00					Perangkat Daerah Selaku Produsen Data, Lembaga Pembina/Walidata, dan Masyarakat Pengguna Data.		383.487.599,00	
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	100 %		90 %	100 %	122.750.000,00						100 %	255.657.599,00	
			Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	100 %		100 %	100 %	69.750.000,00						100 %	127.830.000,00	
	2.20.02.2.01.0018	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia						122.750.000,00							255.657.599,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Statistik Sektoral yang memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	100 %		90 %	100 %	122.750.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		100 %	255.657.599,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.20.02.2.01.0021	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar						69.750.000,00							127.830.000,00	
		Terlaksananya Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	100 %		100 %	100 %	69.750.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		100 %	127.830.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**						**1.061.161.256,00**							**778.081.220,00**	
5.	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**						**1.061.161.256,00**							**778.081.220,00**	
		Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi di Lingkungan Pemerintah Daerah						***1.061.161.256,00***							***778.081.220,00***	
			999.Tingkat keamanan informasi pemerintah	90.6 %		90.2 %	90.3 %	1.061.161.256,00						90.4 %	778.081.220,00	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						1.061.161.256,00					Perangkat Daerah, Aparatur Sipil Negara (ASN), dan Unit Kerja Pengelola Informasi Pemerintah Daerah.		778.081.220,00	
		Terselenggaranya Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul						1.061.161.256,00					Perangkat Daerah, Aparatur Sipil Negara (ASN), dan Unit Kerja Pengelola Informasi		778.081.220,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
													Pemerintah Daerah.			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	-		-	-	1.061.161.256,00						-	778.081.220,00	
	2.21.02.2.01.0010	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik						1.061.161.256,00							778.081.220,00	
		Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	-		-	12 Laporan	1.061.161.256,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		-	778.081.220,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**100.000.000,00**							**200.000.000,00**	
6.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**						**100.000.000,00**							**200.000.000,00**	
		Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di masyarakat						***100.000.000,00***							***200.000.000,00***	
			999. Indeks Teknologi Informasi dan Komunikasi	2.58 Indeks		2.54 Indeks	2.55 Indeks	100.000.000,00						2.56 Indeks	200.000.000,00	
	2.22.08.5.04	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan						100.000.000,00					Pelaku Seni Budaya, Lembaga Kebudayaan, Masyarakat Umum, dan Perangkat Daerah Pengelola Urusan Kebudayaan		200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya pembangunan Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan di Kabupaten Bantul						100.000.000,00					Pelaku Seni Budaya, Lembaga Kebudayaan, Masyarakat Umum, dan Perangkat Daerah Pengelola Urusan Kebudayaan		200.000.000,00	
			Jumlah Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital yang Dibangun	6 Objek		6 Objek	6 Objek	100.000.000,00						6 Objek	200.000.000,00	
	2.22.08.5.04.0002	Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital						100.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital	Jumlah Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital yang Dibangun	6 Objek		6 Objek	3 Objek	100.000.000,00	Kab. Bantul	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		6 Objek	200.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	J U M L A H							**20.721.915.809,00**							**23.624.944.690,00**	

BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2027. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 serta mengacu pada RKPD Tahun 2027.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2027. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah pada Tahun 2027. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

KEPALA,

Bobot Ariffi' Aidin, S.T., M.T
NIP. 196906191996031003
Pembina Utama Muda, IV/c